

BAB 1V

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN

4.1. Deskripsi Wilayah

4.1.1. Sejarah Kota Kupang

Nama kota Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan, yang memerintah kota kupang sebelum bangsa portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, pulau Timor mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa Kota Bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan salah satunya yang strategis menghadap ke teluk Kupang. Derah ini merupakan wilayah kekuatan Raja Helong dan yang menjadi Raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bissi.

Pada tahun 1613, VOC yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim tiga kapal yang dipimpin oleh Apolonius Scotte, menuju pulau timor dan berlabuh di teluk Kupang. Kedatangan rombongan VOC ini di terima oleh raja Helong, yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Pada saat itu VOC belum memiliki kekuatan yang tetap di tanah Timor.

Pada tanggal 29 Desember 1645, seorang pendiri Potugis yang bernama Antonio De Sao Jacinto dengan mendirikan sebuah benteng, namun kemudian benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan diantara mereka. VOC semakin menyadari pentingnya Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kepentingan perdagangannya, sehingga pada tahun 1625 sampai dengan 1663, VOC

melaukan perlawanan ke daerah kedudukan Potugis di pulau solor dan dengan bantuan orang-orang islam di Solor, Benteng Fort Henricus berhasil di rebut oleh VOC.

Pada tahun 1653, VOC mendarat di Kupang dan berhasil merebut bekas Benteng Pottugis Fort Concordia, yang terletak di muara sungai Teluk Kupang dibawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang langsung dipimpin oleh *Openhofd* J. Van Den Heiden. Selama menguasai Kupang sejak tahun 1653 sampai dengan tahun 1810, VOC telah menempatkan sebanyak 38 *Openhofd* dan yang terakhir adalah Stoopkret, yang berkuasa sejak tahun 1808 sampai dengan tahun 1810.

Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, sabu dan solor. Untuk meningkatkan pengamanan Kota maka pada tahun 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada *Staatblad* Nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.

Setelah indonesia merdeka, melalui Surat Keputusan Gubernur tanggal 6 Februari 1946 , Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 dengan bentuk Timor Elland Federatie atau Sewan Raja-Raja Timor dan ketua H. A. A. Koroh, yang juga adalah Raja Amarasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Kupang Nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946 dibentuk *Raad* sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status *Haminte* dengan wali kota pertamanya Th.J. Mesakh. Pada tahun 1955 ketika menjelang pemilu, dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor PUD.5/16/46 tertanggal 22 oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan.

Pada tahun 1958 dengan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958, provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk tiga daerah Swantara, yaitu Daerah Swantara Tk 1 Bali, Daerah Swantara Tk 1 Nusa Tenggara Barat dan Daerah Swantara Tk 1 Nusa Tenggara Timur. Kemudian Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Kabupaten) yang antara lain Kabupaten Kupang. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan yakni kecamatan Kota Kupang.

Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun, kemudian pada tahun 1978 Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1977. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Wali Kota Administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Inf. Samuel Kristian Lerik pada tanggal 36 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun, baik di bidang fisik maupun non fisik.

Usulan rakyat dan Pemerintah Kota Administratif Kupang untuk mengubah status menjadi Kotamadya Daerah tingkat II Kupang disetujui oleh DPR RI dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan oleh Mendagri Mohammad Yogi S. M. Pada tanggal 25 April 1996. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi Kota Kupang.¹

4.1.2. Letak Dan Luas Wilayah

Kota Kupang merupakan satu-satunya Kotamadya di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian Tenggara Indonesia yang memiliki luas wilayah 180,27 km². Kupang terdiri dari enam Kecamatan yaitu: Kecamatan Oebobo, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, dan Kecamatan Kelapa Lima dan 51 kelurahan. Kota Kupang terletak diantara 10⁰ 36 34"-10⁰ 39' 58" LS 123⁰ 32' 23"- 123⁰ 37' 01" BT. Luas Wilayah Kota Kupang keseluruhan yang meliputi dua matra (matra darat dan matra laut) adalah 260,127 km² (26.012,24 Ha), dan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 291.848.

Secara geografis Kota Kupang berbatasan dengan:

¹ Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang Tahun 2018

- a. Bagian timur: berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dngan Kupang Barat
- b. Bagian barat: berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau Kabupaten Kupang
- c. Bagian utara: berbatasan dengan Teluk Kupang
- d. Bagian selatan: berbatasan dengan Kupang Barat dengan Kabupaten Kupang²

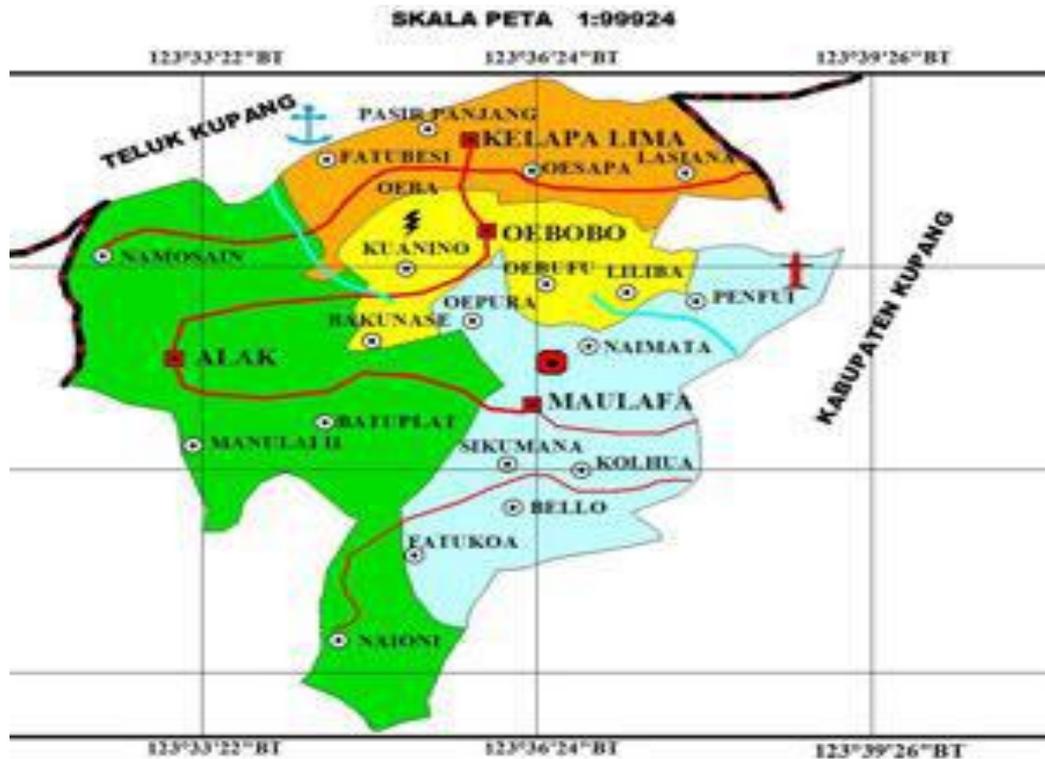
4.1.3. Demografis

Dalam pembagian wilayah, Kota Kupang terbagi atas 6 kecamatan dan 51 kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Alak terdiri dari 12 Kelurahan
- b. Kecamatan Maulafa terdiri dari 9 Kelurahan
- c. Kecamatan Oebobo terdiri dari 7 Kelurahan
- d. Kecamatan Kota Raja terdiri dari 8 Kelurahan
- e. Kecamatan Kelapa Lima terdiri dari 5 Kelurahan
- f. Kecamatan Kota Lama terdiri dari 10 Kelurahan

² Ibid hal 10

Gambar 4.1 : Peta Kota Kupang³



4.1.4. Keadaan Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data demografi Kota Kupang tahun 2018 penduduk Kota Kupang berjumlah 412.708. terdiri dari 211.104 penduduk laki-laki dan 201.604 penduduk perempuan. Dengan demikian maka rasio penduduk laki-laki dan perempuan adalah 105, kepadatan penduduk 100.149 jiwa per km². Berdasarkan klasifikasi penduduk menurut kelompok dan jenis kelamin.

³ Ibid

Tabel 4.1

**Data Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kota Kupang
Tahun 2018.**

No	Usia/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempaun	
1	0-4	19.961	19.479	39,437
2	5-9	18.199	17.719	35,918
3	10-14	17.429	16.724	34,153
4	15-19	24.844	25.673	50,517
5	20-24	36.649	30.934	67,583
6	25-29	21.224	18.746	39,970
7	30-34	16.040	15.228	31,268
8	35-39	12.845	13.456	26,301
9	40-44	11.651	11.983	23,634
10	45-49	10.464	9.896	20,360
11	50-54	8.379	7.392	15,789
12	55-59	5.640	5.505	11,145
13	60-64	3.322	3.240	6,562
14	65+	4.439	5.632	10.071
Total		211.104	201.604	412.708

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Kupang paling banyak berada pada rentang usia 20-24 tahun, yakni berjumlah 67,583 orang, dengan rincian laki-laki 36,649 orang, dan perempuan 30,934 orang. Data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang

paling sedikit berada pada rentang usia 60-64 tahun, yakni sebanyak 6,562 oran, dengan rincian 3.322 laki-laki dan 3.240 perempuan.⁴

4.1.5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Pada umumnya Masyarakat Kota Kupang sebagian besar bermata pencaharian dalam bidang Jasa Keamasyarakatan, Sosial dan Perorangan yakni berjumlah 54.431

Tabel 4.2

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kota Kupang Tahun 2018.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4.400
2	Pertambangan dan Penggalian	755
3	Industri	5.368
4	Listrik, Gas dan Air	2.693
5	Konstruksi	9.067
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	53.579
7	Transportasi dan komunikasi	16,284
8	Keuangan, Real Estate, Persewaan dan jasa perusahaan	10.542
9	Jasa Keamasyarakatan, Sosial dan Perorangan	54.431
10	PNS	5.461
Total		162,580

Tabel diatas menggambarkan tentang jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat Kota Kupang. Kebanyakan masyarakat Kota Kupang bekerja di bagian Jasa kemasyarakatan,

⁴ Ibid hal 10

sosial dan perorangan, yakni 54,431 orang, dan selanjutnya diikuti Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, yakni 53,579 orang. Dan Paling sedikit bekerja di bagian pertambangan dan penggalian, yakni sebanyak 755 orang.⁵

4.1.6. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Kupang

Sektor pendidikan merupakan salah satu tungku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal maupun nonformal terus mendapatkan perhatian dalam melayani kebutuhan masyarakat meskipun masih terdapat angka buta huruf pada masyarakat Kota Kupang.

Tabel 4.3

Data Partisipasi wajib belajar dan Pendidikan Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Ada di Kota Kupang Tahun 2018.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Usia 5 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah	3,25	4,00
2	Usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi	56,72	59,85
3	SD	13,00	12,86
4	SMP	6,21	7,32
5	SMA	7,70	8,05
6	Perguruan Tinggi	13,13	7,92
Total		100,01	93,412

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Kupang yang menamatkan pendidikannya di tingkat sekolah dasar, yakni sebanyak 13,00

⁵ Ibid hal 57

laki-laki dan 12,86 perempuan, diikuti dengan masyarakat yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi, yakni laki-laki 13,13 orang dan perempuan 7,92 orang, tamat SMA sebanyak 7,70 laki-laki dan 8,05 perempuan, tamat SMP sebanyak 6,21 laki-laki dan perempuan sebanyak 7,32. Sedangkan yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak laki-laki 3,25 dan perempuan 4,00 sedangkan yang tidak besekolah lagi sebanyak 56,72 orang laki-laki dan 59,85 perempuan.⁶

4.1.7. Keadaan Menurut Agama Atau Kepercayaan.

Hingga akhir tahun 2018 penduduk Kota Kupang rata-rata ada yang menganut agama kristen protestan sebanyak 71,32%, kemudian Katolik 17,05%, Islam 10,09%, Hindu 1,53% dan Budha 0,01%.⁷

4.2 Deskripsi Obyek Penelitian

4.2.1. Partisipasi Politik Perempuan Dalam Organisasi Partai Politik PKB.

Perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender.

Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, lembaga kenegaraan, dan pemerintahan. Berbicara tentang partisipasi politik wanita, tentu saja kita

⁶ Ibid hal 50

⁷ Ibid hal 47

tidak dapat menghindarkan diri dari diskusi tentang partisipasi politik menurut disiplin ilmu politik.

VISI DAN MISI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

VISI PKB:

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, dan berakhlakul karimah

MISI PKB:

1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.
2. Bidang Hukum: berusaha menegakan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional, dan kritis terhadap lingkungan sosial sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem

pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.

5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.⁸

4.2.2. Deskripsi Obyek Penelitian. (Sejarah Partai PKB)

Keadaan ekonomi Asia yang memburuk pada tahun 1998 berimbas pada krisis moneter di Indonesia. Kesulitan ekonomi memunculkan banyak protes dan kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Soeharto yang dianggap tidak dapat mengatasinya dengan baik. Perlahan tapi pasti berkembang protes-protes terorganisir dari pada aktivis yang makin membesar terutama peristiwa Trisakti dan kerusuhan pada tahun 1998.

Sehari setelah kekuasaan Soeharto jatuh pada tanggal 21 Mei 1998 , muncul desakan dari kaum nahdilyn kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk partai politik. Kronologi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut salah satu sumber adalah sebagai berikut:

“pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air . akhirnya, BPNU mengadakan Rapat

⁸ Sumber: ADRT DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang.

Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin (Rais Syuriah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota KH. M Dawam Anwar (Kitab Aam PBNU), Dr. KH. Said Aqil Siradji, M.A. (Wakil Kitab Aam PBNU), HM. Rozi Munir, SE, M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekertaris Jendral PBNU).”

Selain itu juga dibentuk Team Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, HM. Fachri Taha Ma'ruf, Drs. H. Abdul Aziz, M.A, Drs. H. Andi Muarli Sunrawa, HM. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Hasuni dan Muhaimin Iskandar. Pada tanggal 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsiyering di Villa a Citra Cipanas. Dalam pertemuan ini dihasilkan lima rancangan: pokok-pokok pikiran NU mengenai Reformasi Politik, Mabda Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/RT dan naskah deklarasi.

Akhirnya pada tanggal 23 Juli 1998 KH. Abdurrahman Wahid dan empat kiai besar NU, KH. Mustofa Bisari (Rembang), KH. Munasir Ali (Mojokerto) KH. Muchit Muzadi (Jember), dan KH. Ilyas Ruchiyat (Tasikmalaya) mendeklarasikan berdirinya PKB di Cigancur, Jakarta. Salah satu bagian dari naskah deklarasi pendirian PKB menyatakan:

“kami warga Jam'iyah Nahdelatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa”.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat peran NU dan K.H. Abdurrahman Wahid (dengan beberapa tokoh lainnya) dalam mendirikan PKB. Sehingga cukup alasan jika dikatakan PKB sebagai “anak kandung NU”.⁹

4.2.3. Fungsi Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa berfungsi:

- a. Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia dengan tanpa membedakan asal usul, keturunan, suku, golongan, agama dan profesi.
- b. Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik.
- c. Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat.
- d. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan-kepentingan rakyat didalam lembaga-lembaga dan proses-proses politik.
- e. Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.¹⁰

4.2.4. Badan Pengurus DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Kupang Periode Tahun 2018-2023

Berikut ini akan di tampilkan data mengenaibadan pengurus partai Kebangkitan Bangsa di Kota Kupang periode tahun 2018-2023.

⁹ Hz. Arifin Junaidi, “Belajar Dari Sejarah PKB”, dalam Yenni Zannuba Wahid, dkk(ED)

¹⁰ Sumber:ADRT DPC Partai PKB Kota Kupang

Tabel 4.4

Kepengurusan DPC Partai PKB Kota Kupang periode 2018-2023¹¹

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Dewan Syura	Drs. Suroto
2	Wakil Ketua	Drs. Stefanus Stanis, M.Si
3	Wakil Ketua	Osiyas Alfred Hilly, B.Sc
4	Wakil Ketua	Gerson Pah
5	Sekretaris	Gaspar Atok
6	Wakil Sekretaris	Nikson Nimrod Lakat
7	Wakil Sekretaris	Paulina Pirhi, S.E
8	Wakil Sekretaris	Elisabeth Yosefina Dangku, S.E
9	Ketua Dewan Tanfidz	Drs. Daniel D. Hurek
10	Wakil Ketua	Mengi Februs Lomi Rihi
11	Wakil Ketua	Muhammad H. Amirudin, S.E
12	Wakil Ketua	Theodora Ewalda Taek
13	Wakil Ketua	Anantji Efrogina Ratukitu-Jan
14	Wakil Ketua	Sepri Adonal NakiusThung
15	Wakil Ketua	Dra. Elisabeth Yohanes
16	Wakil Ketua	Paulus Tokan K. P
17	Wakil Ketua	Rony Lotu
18	Wakil Ketua	Fransiskus Emanuel Kolin
19	Sekretaris	Jusuf Abolakada

¹¹ Sumber: SK DPC Partai PKB Kota Kupang Periode Tahun 2018-2023

20	Wakil Sekertaris	Rusydi Saleh maga
21	Wakil Sekertaris	Stefanus Oskar A. Manehat, S.E
22	Wakil Sekertaris	Martha Taga
23	Wakil Sekertaris	Roy Ratu Riwu Kaho
24	Wakil Sekertaris	Cecilia Elisabeth Menge
25	Wakil Sekertaris	Vebbiantai M.R Padja-Kore
26	Wakil Sekertaris	Marsenus Fone
27	Wakil Sekertaris	Adrianus Edison Ndoen
28	Bendahara	Fatmawati A.R, S.E
29	Wakil Bendahara	Theresia Letek
30	Wakil Bendahara	Rachel A. Fangidae Huma
31	Wakil Bendahara	Dominikus Taosu

Sumber: badan Pengurus DPC Partai PKB Kota Kupang Periode tahun 2018-2023.

Tabel 4.5

Data Perolehan Suara caleg PKB yang lolos Tahun 2019¹²

NO	NAMA	DAPIL	JUMLAH SUARA SAH
1.	Theodora Ewalde Taek	Kelapa Lima, Kota Lama	620
2.	Rony Lotu	Oebobo	772
3.	Dominikus Tosu	Maulafa	955
4.	Anatji Ratu Kitu	Kota Raja	999

Sumber: Humas KPU Kota Kupang

¹² Sumber Humas KPU Kota Kupang

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah perolehan suara Caleg PKB yang lolos dalam pemilihan anggota Legislatif Tahun 2019 ada empat caleg PKB yang lolos dalam pemilihan Legislatif yaitu Ibu Theodora Ewalde Taek memperoleh suara sebanyak 620 suara sah, Roni Lotu memperoleh 772 suara sah, Dominikus Tosu 955, dan Ibu Anatji Ratu Kitu memperoleh suara sah sebanyak 999 suara

PKB dipastikan mendapat 1 fraksi di DPRD Kota Kupang. Sebeeb ditiga dapil lainnya, PKB juga mendapatkan masing-masing satu kursi. Antara lain, Theodora Ewalde Taek di Dapil Kelapa Lima Kota Lama, Dominikus di Dapil Maulafa dan Anatji Ratu Kitu di Dapil Kota Raja.

Ketua fraksi tersebut yang diketuai oleh Theodora Ewalde Taek, dan sekertarisnya Dominikus Tosu, serta bendaharanya adalah Anatji Ratu Kitu, dan amgotanya adalah Rony Lotu. Melalui perintah tersebut, maka dalam penjabaran lebih lanjut di Lembaga DPRD sebagai medan atau ruangan untuk mengimplementasikan atau memperjuangkan perintah partai tersebut sehingga mereka telah memutuskan komposisi sebagai ketua fraksi dan sekertaris serta bendahara dan anggotanya.

Distribusi dari setiap caleg PKB Kota Kupang masing-masing perorang paling besar Rp. 5.000.000 karena mereka mempunyai Alat Peraga Kampanye (APK) sedikit, sehingga anggaran sedikit. Para caleg tersebut bekerja dan berjuang secara bersama-sama demi membawa aspirasi masyarakat.